



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

2022

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Pada masa periode Renstra 2020-2024 ini Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (Sekretariat BPSDMI) sebagai unit Eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas penting melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan seluruh bagian di lingkungan BPSDMI khususnya agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat BPSDMI selama tahun 2021, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Mudah-mudahan, penyajian Lakip ini menjadi cermin bagi aparatur khususnya aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris BPSDMI



Yedi Sabaryadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	6
2.1 Perencanaan Kinerja	6
2.1.1 Rencana Strategis Organisasi	6
2.1.2 Rencana Kinerja	11
2.1.3 Indikator Utama Sekretariat BPSDMI	13
2.2 Dukungan Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah	14
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	17
3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2021	19
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	39
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.4 Kendala dan Tindak Lanjut	44
3.4.1 Kendala	44
3.4.2 Tindak Lanjut	44
BAB IV PENUTUP	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian selama tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian 2020-2024 pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Perindustrian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM Industri dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi Industri. Renstra memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPSDMI.

Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2022 telah melakukan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2022. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022 sudah dapat dicapai oleh Sekretariat BPSDMI. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang telah dijalankan selama periode tahun anggaran berjalan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja Sekretariat BPSDMI telah tercapai dan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang. Sekretariat BPSDMI akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kesekretariatan sesuai dengan sasaran tujuan yaitu “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Perindustrian membawa negara Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas BPSDMI di bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan sumber daya manusia (SDM) industri, Sekretariat BPSDMI memiliki peran penting dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Peran penting tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu Sekretariat BPSDMI dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi secara lebih cepat, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya, proses bisnis dan pihak- pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi.

Dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, Sekretariat BPSDMI pada tahun anggaran 2021, telah melakukan berbagai pelayanan administratif kepada Unit Kerja di bawah BPSDMI diantaranya adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal dan meningkatkan kinerja organisasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencakup entitas Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi sampai dengan Satuan Kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

LAKIP Sekretariat BPSDMI ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat diklat bagi aparatur perindustrian. LAKIP ini disusun bersifat rutin sekali dalam setahun, dan disampaikan secara bertahap dan berjenjang pada setiap akhir tahun anggaran. Sehingga dengan demikian LAKIP ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat BPSDMI juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan untuk mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga mewujudkan manajemen sekretariat yang profesional.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas Sekretariat BPSDMI adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BPSDMI menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b) koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;
- c) koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- d) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f) koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja badan

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas BPSDMI sebagai unit eselon I dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMI menetapkan visi **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh”**.

Dengan memperhatikan visi BPSDMI, maka Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan visi **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama.
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai, Sekretariat BPSDMI telah melaksanakan 1 program yaitu Program Dukungan Manajemen.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dipimpin oleh Sekretaris BPSDMI yang membawahi 1 (satu) Unit Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:

a) Bagian Umum

Bagian umum Memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik Negara, kearsipan, persuratan, dan manajemen kinerja badan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik Negara, kearsipan, dan persuratan badan; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja badan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Struktur organisasi BPSDMI Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat BPSDMI

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat BPSDMI selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, arah kebijakan dan struktur organisasi BPSDMI.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat BPSDMI tahun 2021 meliputi Renstra Sekretariat BPSDMI 2020- 2024, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat BPSDMI dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Sekretariat BPSDMI tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat BPSDMI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Sekretariat BPSDMI yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat BPSDMI beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Namun sejalan dengan berjalannya tahun anggaran 2022 terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021, Kementerian Perindustrian perlu menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024 dengan mengacu kepada perubahan tersebut. Atas dasar tersebut, Sekretariat BPSDMI perlu juga menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024, sehingga rencana strategis Sekretariat BPSDMI dapat sejalan dengan rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan rencana strategis Kementerian Perindustrian

Penyusunan Renstra Sekretariat BPSDMI telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kebijakan pengembangan industri nasional khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia industri. Secara ringkas substansi Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi dan misi BPSDMI disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Kemenperin dengan tugas dan fungsi BPSDMI, serta kondisi SDM industri yang ingin dicapai pada akhir 2024, seperti yang termaktub di dalam buku Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju “Corporate University” BPSDMI Kementerian Perindustrian. Selain itu, penyusunan visi dan misi BPSDMI juga mempertimbangkan capaian kinerja,

kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari stakeholders terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka visi BPSDMI ditetapkan sebagai berikut: **“Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”** Dengan memperhatikan Visi BPSDMI, maka Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan visi **“Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional”**.

Sejalan dengan visi tersebut, Sekretariat BPSDMI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

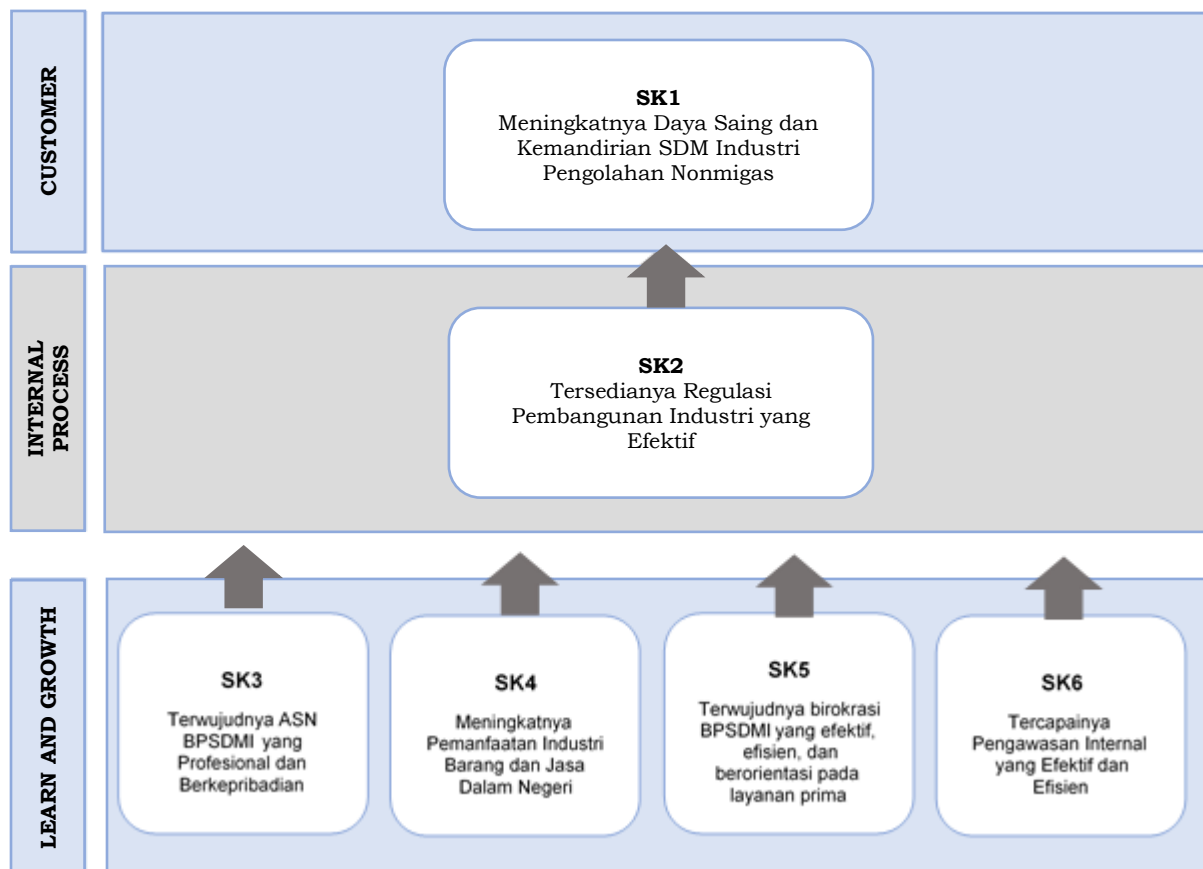
1. Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif yang optimal;
2. Meningkatkan kinerja organisasi yang prima melalui dukungan SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai; dan
3. Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi seperti disebutkan di atas, Sekretariat BPSDMI menetapkan sasaran tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.”** Dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut : **Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.**

D. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024

Sasaran program Sekretariat BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, Sekretariat BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi BPSDMI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar Peta Strategi Sekeretariat BPSDMI Tahun 2020-2024

Perspektif Pelanggan (*Customer Prespective*)

Sasaran kegiatan pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu “**Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas**”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja.
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas.

Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan kedua (SK2), yaitu **“Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif”**, dengan indikator kinerja:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran kegiatan ketiga (SK3), yaitu: **“Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian”**, dengan indikator kinerja:

1. Rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BPSDMI.

Sasaran kegiatan keempat (SK4), yaitu **“Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”**, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI.

Sasaran kegiatan kelima (SK5), yaitu: **“Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”**, dengan indikator kinerja:

1. Nilai laporan keuangan BPSDMI.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI.
3. Nilai kearsian BPSDMI.

Sasaran kegiatan keenam (SK6), yaitu **“Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”**, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti.
2. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI).

E. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat BPSDMI

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, telah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yang tertuang ke dalam Rencana Strategis BPSDMI 2020-2024. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama.
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

F. Program dan Kegiatan

Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian menetapkan 1 program yang dilaksanakan yaitu Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan yaitu Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun kegiatan rincian output (KRO) BPSDMI yang dilakukan untuk mencapai kegiatan dan program tersebut:

1. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043)

a. Layanan Perkantoran (EAA)

- Layanan Perkantoran BPSDMI Pusat
- Layanan Perkantoran Politeknik Industri
- Layanan Perkantoran SMK Industri
- Layanan Perkantoran Balai Diklat Industri

b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal BPSDMI Pusat
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Politeknik Industri

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal SMK Industri
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat
- c. Layanan Sarana Internal (EAC)
 - Layanan Sarana dan Prasarana BPSDMI Pusat
 - Layanan Sarana dan Prasarana Politeknik Industri
 - Layanan Sarana dan Prasarana SMK Industri
 - Layanan Sarana Prasarana Balai Diklat industri
- d. Bantuan Produk (QEC)
 - Bantuan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM

2.1.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra Sekretariat BPSDMI, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat BPSDMI selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Kinerja Tahun 2022, Sekretariat BPSDMI menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Pada tahun 2022 BPSDMI melakukan revisi perjanjian kinerja sehingga Sekretariat BPSDMI selaku unit eselon II di bawah BPSDMI juga melakukan penyesuaian dengan melakukan revisi rencana strategis dan rencana kinerja 2022 dengan indikator sebagai berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan **Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**, dengan Indikator Tujuan Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dengan nilai 74.

- **Perspektif Customer**

- **Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas**, dengan indikator kinerja:

1. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 20,84 Juta Orang;

2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebanyak 14,96%;
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebesar Rp 115,77 Juta/orang/tahun.

- **Perspektif Internal Process**

- **Sasaran kegiatan 2 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif**, dengan indikator kinerja:
 1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 74%.

- **Perspektif Learn & Growth**

- **Sasaran kegiatan 3 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian**, dengan indikator kinerja:
 1. Rata-rata Indeks kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI dengan indeks 73.
- **Sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri**, dengan indikator kinerja:
 1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI sebesar 60%.
- **Sasaran kegiatan 5 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**, dengan indikator kinerja:
 1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 74;
 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 74;
 3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri senilai 77.
- **Sasaran Kegiatan 7 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**, dengan indikator kinerja:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sebesar 92%;
 2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) level 3.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat BPSDMI

Dari sasaran program dan indikator kinerja diatas, Sekretariat BPSDMI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dengan target 60%

2.2 Dukungan Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Sekretariat BPSDMI tahun anggaran 2022 alokasi anggaran awal untuk Sekretariat BPSDMI adalah sebesar Rp. 63.246.443.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan Program Dukungan Manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Pagu
6043 Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	6043.EAB Layanan Perencanaan dan Panganggaran Internal	Rp 19.173.165.000
	6043.EAD Layanan Sarana Internal	Rp. 1.500.000.000
	6043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 42.573.278.000
Total		Rp 63.246.443.000

Pada akhir tahun 2022 terjadi perubahan pagu anggaran untuk Sekretariat BPSDMI karena adanya relokasi dan revisi anggaran sehingga pagu akhir Sekretariat BPSDMI adalah sebesar Rp. 56.417.415.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Pagu
6043 Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	6043.EAB Layanan Perencanaan dan Panganggaran Internal	Rp. 14.352.137.000
	6043.EAD Layanan Sarana Internal	Rp. 1.500.000.000
	6043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 40.565.278.000
Total		Rp 56.417.415.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Jangka Menengah

Sekretariat BPSDMI sebagai unit Eselon II di bawah BPSDMI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI. Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Naskah Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI Tahun 2020-2024, Naskah Revisi Renstra Sekretariat BPSDMI merupakan penjabaran dari Naskah Revisi Rencana Strategis (Renstra) BPSDMI Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 6/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 319 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 61 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2020-2024.

Target Kinerja Sekretariat BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
	Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	75	76
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas						
	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	Persen	-	72	74	78	78
SK3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	1	Nilai laporan keuangan badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	70	72	74	76	78
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4

Rencana anggaran Sekretariat BPSDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Alokasi (dalam milyar rupiah)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	0	0	0	0	0	0
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	0	0	0	0	0	0
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	0	0	0	0	0	0
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	0	0.48	0.58	1.38	1.50	1.50
SK3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	2.10	1.17	1.05	2.34	2.50	2.50
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	59.61	4.63	92.12	6.39	7,0	7,0
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	1	Nilai laporan keuangan badan Pengembangan SDM Industri	0.93	1.44	1.10	3.36	4	4
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan SDM Industri	4.01	2.54	3.83	5.88	5.25	5.25
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	0.15	0.13	0.60	0.80	1,00	1,00
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	0.42	0.33	0.37	0.36	0.50	0.50
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	0	0.08	0.17	0.12	0.25	0.25

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat BPSDMI yaitu "**Terwujudnya Manajemen Sekretariat yang Profesional**".

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2022 dengan realisasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022 sudah dapat dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Hal tersebut nampak pada tingkat persentase dari pencapaian target sasaran baik fisik maupun anggaran yang rata-rata lebih dari 90.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada akhir tahun 2021 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan rincian tabel sebagai berikut:

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	20,84	Juta Orang	19,11	91,69%
		2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	14,96	Persen	14,13	94,45%
		3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,77	Rp Juta /orang/ tahun	114,33	99%
SK.2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	74	Persen	81	109,46%
SK.3	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Profesional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Kompetensi Profesionalitas ASN BPSDMI	73	Indeks	45,35	62,12%
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	60	Persen	61,21	102%
SK.5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	Nilai	79,15	107%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	Nilai	75	101,35%
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	77	Nilai	69	90%
SK.6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	Persen	93,75	102%
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	Level	2,85	95%

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang realisasi di bawah target dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperoleh serta penarikan blokir automatic adjustment oleh kemenkeu di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang berakibat pada kurang maksimalnya output yang dihasilkan, detail capaian tersebut berikut:

- **Tujuan**

Sasaran Tujuan Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, memiliki indikator tujuan:

1. Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Target indikator kinerja utama ini pada tahun 2022 adalah dengan nilai 74. Target ini mengetahui tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat BPSDMI. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner untuk mendapatkan penilaian persepsi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan baik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat BPSDMI pada 2022 rata-rata baik dengan nilai 90 sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Tujuan

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C%	T	R	C%	T	R	C%	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat BPSDMI	70	88	125	72	72	100	74	90	122	Nilai

Capaian nilai 90 didapat dari hasil konversi kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh 55 pegawai dengan nilai 3,61 pada skala likert. Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 122% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 dengan nilai 76.

- **Prespektif Customer**

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas memiliki 5 Indikator Kinerja yaitu:

1. Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi leading sector yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas dari Sakernas yaitu KBLI 10-18 dan 20-33. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung setiap bulan Februari dan Agustus. Sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada 2022 sebesar 19,11 juta orang atau 92% dari target 20.64 juta orang. Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas belum memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi Indikator Kinerja			18,29	18,65	102	20,84	19,11	92	Juta Orang

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI. Capaian indikator tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 18,65 juta orang menjadi 19,11 juta orang. Rincian Indikator Kinerja Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebagai berikut:

KBLI	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22
10	4,780,725	4,817,440	4,806,673	5,016,316	5,211,127	5.218.967
11	361,188	392,936	402,663	425,037	370,373	506.398
12	338,164	405,178	327,766	514,019	352,138	439.730
13	1,260,753	1,101,206	1,034,251	1,129,954	1,056,405	1.107.639
14	2,713,868	2,329,274	2,316,969	2,522,691	2,577,137	2.705.414
15	872,586	669,185	726,967	759,471	1,065,283	962.760
16	1,872,891	1,616,546	1,512,928	1,689,993	1,895,932	1.696.590
17	261,268	241,651	267,387	286,758	206,017	261.578
18	398,793	286,392	306,526	282,050	200,007	347.392
19	33,202	43,260	87,730	46,379	38,553	58.384
20	401,946	333,023	453,483	401,583	361,470	381.164
21	136,449	134,651	178,301	152,411	122,081	157.872
22	468,151	567,748	589,262	569,787	546,765	611.730
23	1,201,016	1,106,089	1,069,858	1,151,438	1,021,226	924.880
24	290,121	239,398	219,084	259,290	210,305	235.566
25	638,052	601,535	709,999	667,333	535,336	615.650
26	137,150	151,687	157,154	160,632	125,722	154.997
27	136,725	179,934	192,008	230,936	166,411	190.408
28	161,934	178,219	195,336	201,808	128,830	212.284
29	208,773	200,386	266,902	190,454	193,991	210.479
30	289,462	208,106	242,275	196,748	257,302	253.311
31	885,307	740,480	844,722	843,940	1,053,028	878.487
32	655,122	718,236	721,201	771,423	762,512	843.132
33	205,795	220,289	194,123	224,012	213,975	197.585

Industri Pengolahan	18,709,441	17,482,849	17,823,568	18,694,463	18,671,926	19.172.397
Industri Pengolahan Non Migas	18,676,239	17,439,589	17,735,838	18,648,084	18,633,373	19.114.013
Total TK	133,292,866	128,454,184	131,064,305	131,050,523	135,611,895	135.296.713

*Data dihitung per Februari dan Agustus, rilis \pm 1 bulan

*Perhitungan produktivitas tenaga kerja pada umumnya dilakukan setelah angka full year terpenuhi

Sumber: Pusdatin (data diolah)

Realisasi yang belum tercapai namun telah mendekati target ini dipengaruhi oleh kinerja sektor manufaktur, seperti PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Sepanjang tahun 2022 terjadi banyak PHK yang dipicu imbas kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung serta menurunnya kinerja ekspor. PHK yang terjadi secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan berakibat pada turunya jumlah tenaga kerja.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 92% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 21,94 juta orang.

- Kendala:

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja

Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional.

Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung setaip bulan Februari dan Agustus. Sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2022.

Capaian atau realisasi pada Indikator Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja pada Triwulan IV 2022 sebesar 14.13% atau 94% dari target 14.9%. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap Total Pekerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Belum menjadi Indikator Kinerja			13,96	14,23	101,93	14,96	14,13	94	Juta Orang

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI. Capaian indikator persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 101.93% menjadi 94% pada tahun 2022. Rincian Indikator Kinerja Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja sebagai berikut:

	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22
Industri Pengolahan	18,709,441	17,482,849	17,823,568	18,694,463	18,671,926	19.172.397
Industri Pengolahan Non Migas	18,676,239	17,439,589	17,735,838	18,648,084	18,633,373	19.114.013
Total TK	133,292,866	128,454,184	131,064,305	131,050,523	135,611,895	135.296.713
Persentase TK IP Non Migas (%)	14.01	13.58	13.53	14.23	13.74	14.13

Sumber: Pusdatin (diolah)

Realisasi yang belum tercapai namun telah mendekati target ini oleh kinerja sektor manufaktur, seperti PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja, dan Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur. Sepanjang tahun 2022 terjadi banyak PHK yang dipicu imbas kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung serta menurunnya kinerja ekspor. PHK yang terjadi secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan berakibat pada turunnya jumlah tenaga kerja.

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 94% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 15,65 juta orang.

- Kendala:

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian

3. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.

Indikator ini merupakan turunan dari renstra kementerian perindustrian yang sumber datanya berasal dari Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas. Data tersebut kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian. Data pada indikator ini dihitung setiap bulan Februari dan Agustus. Sehingga data yang dilaporkan pada laporan ini merupakan data yang dikeluarkan pada Agustus 2022. PDB triwulan IV 2022 belum release sehingga data PDB menggunakan PDB pada triwulan III . Sehingga capaian Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada laporan ini belum maksimal.

Capaian atau realisasi pada Indikator Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas pada Triwulan IV 2022 sebesar 114,33 juta/orang/tahun atau 99% dari target 115,77 juta/orang/tahun. Indikator Kinerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Belum menjadi Indikator Kinerja			115,5	111,6	97	115,77	114,33	99	Rp Juta /orang/ tahun

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI. Capaian indikator Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 96.62% menjadi 99% pada tahun 2022. Rincian Indikator Kinerja Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas sebagai berikut:

Data	2020	2021	Tw I-2022	TW II-2022	TW III-2022
PDB ADHK IP Non Migas (Rp Juta)	2.007.316.600	2.081.054.800	536.047.200	1.071.607.800	1.625.764.000
Tenaga Kerja (Orang)	17.439.589	18.648.084	18.633.373	18.633.373	19.114.013
Produktivitas TK (Rp Juta/Orang/Tahun)	115,1	111,6	28,8	57,5	85,1

*Perhitungan produktivitas tenaga kerja pada umumnya dilakukan setelah angka full year terpenuhi

Sumber: Pusdatin (diolah)

Realisasi yang belum tercapai namun telah mendekati target ini disebabkan karena kenaikan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan kenaikan PDB 2022, selain itu perhitungan tenaga kerja menggunakan perhitungan bulan agustus 2022 sehingga data yang dihasilkan tidak realtime.

Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nonmigas BPSDMI telah melakukan pelatihan tenaga kerja pada sector-sektor industri pengolahan non-migas (Alas Kaki, Animasi, Digital Marketing, Elektronika, Furnitur, Industri 4.0, Jaringan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kimia Analisis, Logam, Makanan dan Minuman, Mekanik Otomotif, Pengelasan, Pengolahan Agro, Plastik,

Telematika, TPT) berupa diklat 3 in 1 yang memiliki jenis diklat berupa skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Pelatihan skilling bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri. Sasaran peserta pada pelatihan skilling adalah para calon tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan pada umumnya adalah mereka yang baru lulus dari Pendidikan di SMK/SMA. Ruang lingkup jenis pelatihan skilling ini diutamakan pada peningkatan keahlian calon tenaga kerja di level pemula atau untuk jabatan operator di perusahaan industri.

Pelatihan up-skilling ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki. Pelatihan jenis ini diharapkan dapat membekali tenaga kerja untuk memperoleh kompetensi pada jenjang karier yang lebih tinggi dari posisi mereka saat ini di industri.

Pelatihan re-skilling bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja ke bidang keahlian lain sesuai kebutuhan industri. Baik pelatihan up-skilling maupun re-skilling lebih fokus pada tenaga kerja yang sudah bekerja pada perusahaan industri dan memiliki keahlian sebelumnya ataupun terdampak adanya pergeseran pekerjaan (job shifting).

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 99% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 124,73 juta orang.

- Kendala:

1. Data tidak keluar secara real time serta waktu rilis data tidak pasti \pm 1-2 bulan
2. Data PDB umumnya dihitung pada akhir tahun dan dirilis setelah tahun berjalan

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan pusdatin terkait data capaian
2. Menghitung PDB pada triwulan sebelumnya untuk laporan pada triwulan berjalan

• **Perspektif Bisnis Internal Proses**

Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin.

Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI sebesar 81% atau 109% dari target 74%. Indikator ini merupakan persentase antara regulasi yang telah ditetapkan di lingkungan BPSDMI dan telah diterapkan terhadap seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja			72	62,5	86,61	74	81	109	Persen

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI. Capaian indikator Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 86,61% menjadi 109% pada tahun 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	KKNI	IER
1.	KKNI Bidang Analisis Kimia (Permenperin No. 8 Tahun 2019)	73%
2.	KKNI Bidang Industri Alat Berat (Permenperin No. 40 Tahun 2020)	80%
3.	KKNI Bidang Industri Garmen (Permenperin No. 35 Tahun 2020)	74%
4.	KKNI Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan (Permenperin No. 50 Tahun 2018)	96%
Total IER		81%

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 109% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 78%.

- Kendala:

1. Respon dari industri yang masih cukup lambat untuk mengisi kuisisioner

- Tindak Lanjut:

1. Melakukan follow up ke industri untuk mengisi kuesioner

- **Perspektif Learn & Growth**

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya ASN BPSDMI yang Professional dan Berkepribadian memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu: Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI

Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indikator ini merupakan Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI yang di dapatkan dari Biro OSDM Kementerian Perindustrian.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI sebesar 43,35 atau 62,12% dari target nilai 73. Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya ASN BPSDMI yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI			Belum menjadi Indikator Kinerja	71	66,43	93,56	73	45,35	62,12	Indeks

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja Sekretariat BPSDMI. Capaian indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 93.56% menjadi 62,12% pada tahun 2022. Belum tercapainya indikator ini diantaranya karena terdapat pegawai yang tidak melakukan updating data terkait keikutsertaan diklat (kompetensi). Rincian perhitungan rata-rata indeks profesionalitas ASN Sekretariat BPSDMI dapat dilihat sebagai berikut:

REKAPITULASI NILAI IPASN
 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
 Tahun 2022

Tanggal update : 2023-01-30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031

No.	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1.	196702031993031002	YEDI SABARYADI	Jabatan Struktural	15	0	25	5	45
2.	198509272009012004	RITA TRIWI HAMIDAH	Pelaksana	15	0	25	5	45
3.	198303142010122007	EWESTI INDIRI HANDAYANI	Pelaksana	20	0	0	5	25
4.	199008242018011001	MUHAMMAD FAIZ	Pelaksana	15	0	25	5	45
5.	19960830202020122003	ARTHIT ASRI JAYANTI HARDIMAN	Pelaksana	15	0	25	5	45
6.	199707142018122002	SELGA KARUNIA SARI	Pelaksana	10	0	25	5	40
7.	196511212002121001	TUGINO	Pelaksana	5	0	25	5	35
8.	196909181990111001	TEGUH NIRBITO	Pelaksana	15	0	25	5	45
9.	197109162007011005	SAKMIN	Pelaksana	5	0	25	5	35
10.	199603282018121001	SATYA PRANATA	Pelaksana	10	0	25	5	40
11.	196807131988032001	TRI IARNI	Pelaksana	5	0	25	5	35
12.	198412152020121001	RESI ROSAFANDY	Jabatan Fungsional	15	15	25	5	60
13.	199202192019012001	FEBRI AYU PRANSISKA	Jabatan Fungsional	10	33	25	5	73
14.	199301112020121002	MASYANI AZIL HAKIMI	Jabatan Fungsional	15	0	25	5	45
15.	199502272019012001	RISTA FITRIANI	Jabatan Fungsional	10	34	25	5	74
16.	199505232019012001	DWINA KHAIRUNISA PUTRI	Jabatan Fungsional	15	15	25	5	60
17.	198711212009012001	LUSI MARTA SARI	Jabatan Struktural	20	0	30	5	55
18.	196802202007011005	BAITUL MUKADAS DALA	Pelaksana	5	0	25	5	35
19.	197104232007011003	ANDI HADI SUBASTRO	Pelaksana	5	0	25	5	35
20.	197411302007011002	UNTARA PRASETYA	Pelaksana	5	0	25	5	35
21.	197607252007101001	ADE YOHANA	Pelaksana	1	0	25	5	31
22.	199209292020122003	BERLLY NAULY WIJAYANTI SAPUTRI	Pelaksana	15	0	25	5	45
23.	199509172020121002	MUHAMMAD AMIRUDIN AZIZ	Pelaksana	15	0	15	5	35
24.	196009291989011002	MULJADI T.JAHJADI	Jabatan Fungsional	15	15	25	5	60
25.	197004151990111001	UMAR DANI	Jabatan Fungsional	5	15	25	5	50
26.	197909182006041002	WELLIE ARRAHMADI	Jabatan Fungsional	15	0	25	5	45
27.	198011012006042003	ERI NOVALIA	Jabatan Fungsional	20	25	25	5	75
28.	198103082006042003	WURI WULAN SAPUTRI	Jabatan Fungsional	15	25	25	5	70
29.	198507092010121001	BINTANG NUGROHO	Jabatan Fungsional	20	0	25	5	50
30.	198707272009112001	GYA MADYARATRI	Jabatan Fungsional	20	0	25	5	50
31.	198711092010121002	ACHMAD ZAINOEDJEN	Jabatan Fungsional	15	15	25	5	60
Rate-rata				12,45	6,19	24,03	5,00	47,68

Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar indeks 80.

- Kendala:

1. Belum updatenya aplikasi mySPAK

- Tindak Lanjut:

1. Mendorong dan memotivasi pegawai untuk mengupdate data diri pada aplikasi BKN

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Indikator ini merupakan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI sebesar 61,21% atau 102 dari target 60%. Indikator Kinerja Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Belum menjadi Indikator Kinerja			50	55	110	60	61,21	102	Persen

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI. Data Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI dapat dilihat pada intranew kementerian perindustrian di menu emonitoring-APBN sebagai berikut:

Monitoring Pagu dan Realisasi PDN						
<small>Hanya untuk Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 522111, 533111</small>						
No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	103.305.712.000				
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	101.147.205.000	94.935.302.185	411.012.808	1.400.219.213	94,26%
3.	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	110.475.740.000	90.802.395.074	1.185.831.500	7.319.158.692	83,27%
4.	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	8.609.001.000	8.164.447.270	950.000	434.813.820	94,85%

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 102% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 80%.

- Kendala:

- Masih terdapat banyak data yang belum masuk dalam perhitungan realisasi P3DN padahal telah dilakukan update data pada akun PPK
- Data tidak andal karena hanya berdasarkan dari intranew

- Tindak Lanjut:

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan P3DN
- Berkoordinasi dengan LSPE terkait P3DN

Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan kementerian perindustrian bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon).

Indikator ini merupakan Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 79,15 atau 107% dari target nilai 74.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	73	104	72	70	97,22	74	79,15	107	Nilai

Capaian indikator Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 97.22% menjadi 107% pada tahun 2022. Nilai ini disampaikan dalam surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian Nomor: B857/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang hasil penyampaian hasil penilaian laporan keuangan tingkat satker dan unit eselon I TA 2021. Dengan isian sebagai berikut:

Lampiran III Surat : Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I TA 2021
 Nomor : B857 /SJ-IND.3/KU/VIII/2022
 Tanggal : 22 Agustus 2022

NILAI LAPORAN KEUANGAN TA 2021 TINGKAT UNIT ESELON I

NO	ESELON I	KESESUAIAN SAP	KECUKUPAN INFORMASI	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN	KETAATAN PERATURAN	TOTAL
1	IKMA	11,00	61,80	2,00	19,50	94,30
2	BSKJI	14,00	60,40	2,00	17,50	93,90
3	ITJEN	13,00	61,15	2,00	16,50	92,65
4	SETJEN	10,00	63,00	2,00	17,50	92,50
5	ILMATE	14,00	62,50	2,00	14,00	92,50
6	KPAII	15,00	57,50	2,00	17,50	92,00
7	IKFT	15,00	55,15	2,00	16,50	88,65
8	AGRO	14,00	53,50	2,00	15,50	85,00
9	BPSDMI	12,00	50,15	2,00	15,00	79,15

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 107% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar nilai 78.

- Kendala:

1. Memiliki satuan kerja yang banyak di antara eselon 1 lain
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Arahan dari biro keuangan/apk/BPK harus melalui eselon 1 dahulu, sehingga

pengerjaan lebih terlambat, pengumpulan data yang dibutuhkan sulit karena harus berkoordinasi dengan satker lain

4. Penyusunan LK eselon 1 baru bisa dilakukan setelah satker selesai, sehingga jika satker masih belum selesai eselon 1 akan terhambat

- Tindak Lanjut:

1. Mendorong seluruh satuan kerja untuk segera menyelesaikan laporan keuangannya

2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator ini merupakan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian khususnya Inspektorat I bagi BPSDMI.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 73,15 atau 101,60% dari nilai 72. Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	70	72,34	104	72	73,15	101,60	74	75	102	Nilai

Capaian indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat BPSDMI pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 101% menjadi 102% pada tahun 2022. Nilai ini disampaikan dalam surat Inspektur I Kementerian Perindustrian Nomor: 13/IJ-IND.2/LHE/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Sekretariat BPSDMI. Dengan isian sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah melaksanakan evaluasi AKIP pada Sekretariat BPSDMI dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sekretariat BPSDMI memperoleh nilai sebesar 75,00 atau BB dengan interpretasi Sangat Baik.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Sekretariat BPSDMI dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja	: 22,80
b. Pengukuran Kinerja	: 23,10
c. Pelaporan Kinerja	: 11,85
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	: 17,25

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 102% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar nilai 78.

- Kendala:

1. Terdapat indikator yang belum *smart indicator*, namun merupakan indicator yang turun dari Kementerian Perindustrian tetapi unit-unit pusat maupun satuan kerja telah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, sehingga beberapa indikator tersebut digunakan oleh Sekretariat BPSDMI walaupun tidak sesuai dengan tupoksi Sekretariat BPSDMI.

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal

3. Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri

Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kemenperin tiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Indikator ini merupakan Nilai kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang dilaksanakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri senilai 69 atau 90% dari target nilai 77. Indikator Kinerja Nilai Kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri			Belum menjadi Indikator Kinerja	75	69	92	77	69	90	Nilai

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja di Sekretariat BPSDMI. Capaian indikator kearsipan pada tahun 2022 ini masih menggunakan penilaian kearsipan pada tahun 2021 karena belum dilakukan penialain Kembali oleh Biro Umum Kementerian Perindustrian. Nilai ini disampaikan dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: B/3/SJ-IND/KR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2021. Dengan isian sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 2021
Sesuai BA penetapan hasil pengawasan kearsipan Internal
Nomor AK.01.00/238/2021

PERINGKAT	KATEGORI UNIT KEARSIPAN	Nilai Verifikasi ANRI
1	Biro Umum	94,18
2	Ses Ditjen ILMATE	90,91
3	Sekretariat Inspektorat Jenderal	88
4	Ses Ditjen IKFT	84
5	Ses BSKJI	76
6	Ses Ditjen Ind Agro	74
7	Ses Ditjen IKMA	73
8	Ses BPSDMI	69
9	Ses Ditjen KPAIL	50

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 90% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar nilai 80.

- Kendala:

1. Belum adanya ruangan yang dikhususkan untuk arsip terutama pada BPSDMI pusat yang ada
2. Serta kurangnya tenaga Arsiparis di Sekretariat BPSDMI

- Tindak Lanjut:

1. Menyediakan ruangan yang dikhususkan untuk arsip
2. Penambahan JFT Arsiparis atau tenaga Arsiparis di Sekretariat BPSDMI

Sasaran Kegiatan 6 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu:

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Indikator ini merupakan persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh BPSDMI terhadap rekomendasi dari temuan Inpektorat Jenderal.

Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti adalah sebesar 30 rekomendasi atau sebesar 30 dari jumlah rekomendasi sebesar 32 atau 93,75% dari target 92%. Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Belum menjadi Indikator Kinerja			91,5	61,49	67,20%	92	93,75	102	Nilai

Pada tahun 2020 indikator ini belum dijadikan indikator kinerja oleh Sekretariat BPSDMI. Capaian indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 67,2% menjadi 102% pada tahun 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Tahun Anggaran	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
BPSDMI								
2	Set BPSDMI	2019	14	24	20	3	1	0
		2020	6	8	7	0	1	0
TOTAL			20	32	27	3	2	0

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 102% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar 93%.

- Kendala:

1. Penyampaian pemenuhan bukti tindak lanjut ke Inspektorat Jenderal atas saldo temuan yang ada belum maksimal
2. Belum ada *update* terbaru dari Inspektorat Jenderal tentang pemenuhan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan.

- Tindak Lanjut:

1. Segera melakukan penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi Itjen
2. Melakukan *uyydate* atas pemenuhan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan

2. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.

Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing

sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Indikator MRI selama ini telah dilaksanakan dan memiliki nilai agregat untuk tingkat kementerian yaitu 2,85, sehingga nilai ini yang dijadikan capaian oleh BPSDMI. Capaian atau realisasi pada Indikator Kinerja Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) senilai 2,85 level atau 95% dari target 3 level Indikator Kinerja Index Penerapan.

Realisasi Indikator Kinerja

SK	IK	2020			2021			2022			Satuan
		T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Belum menjadi Indikator Kinerja			3	2,77	92	3	2,85	95	Nilai

Pada tahun 2020 indikator ini belum menjadi indikator kinerja BPSDMI. Capaian indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 92.33% menjadi 95% pada tahun 2022. Nilai ini disampaikan dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: B/428/SJ-IND/KU/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian tahun 2021/2022. Dengan isian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	1,200
2.	Struktur dan Proses	2	0,903
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,960
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2	3,063
	- MRI	2	2,850
	- IEPK	3	3,650

Dengan presentase ketercapaian indikator ini sebesar 95% diharapkan berbanding lurus dengan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan outcome dari setiap unit kerja dan Kementerian Perindustrian sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indikator ini dan akan selalu dilakukan pemantauan secara berkala setiap tahunnya sehingga akan dapat mencapai target pada tahun 2024 sebesar level 3.

- Kendala:

1. Penilaian dikeluarkan oleh inspektorat jenderal pada akhir tahun untuk level kementerian, dan sama bagi seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

- Tindak Lanjut:

1. Berkoordinasi dengan inspektorat jenderal

3.2 Realisasi Anggaran 2022

Penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDMI tahun 2022 tidak dapat dipisahkan secara terperinci antara suatu program inisiatif atau kegiatan hanya mendukung pencapaian sasaran strategis ataupun satu indikator kinerja. Hal ini disebabkan karena beberapa program inisiatif atau kegiatan yang dilaksanakan mendukung secara simultan untuk pencapaian beberapa sasaran strategis atau indikator kinerja. Realisasi anggaran yang belum tercapai sepenuhnya namun telah mendekati 100% yang ditetapkan ini diantaranya disebabkan oleh *refocussing* anggaran sehingga dalam pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terhambat.

Selama tahun 2022, realisasi anggaran Sekretariat BPSDMI adalah Rp. 54.231.138.551,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 56.417.415.000,- atau sebesar 96,12% dari total pagu Tahun 2022 digunakan untuk melaksanakan untuk Program Dukungan Manajemen BPSDMI, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Output	Pagu	Realisasi	Persen
6043 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	6043.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp. 14.352.137.000	Rp. 14.299.601.584	99,63%
	6043.EAD Layanan Sarana Internal	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.499.757.485	99,98%
	6043.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 40.565.278.000	Rp. 38.431.779.482	94,74%
Total		Rp 56.417.415.000	Rp 54.231.138.551	96,12%

**Realisasi dan Pagu Anggaran per Indikator
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Tujuan/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Satuan	%	Pagu	Realisasi	%
Tj	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	90	Nilai	122	Rp. 18.141.355.000	Rp. 16.073.228.343	88,60%
PERSPEKTIF CUSTOMER									
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	20,84	19,11	Juta Orang	91,69%	Rp. 5.367.123.000	Rp. 5.356.395.139	99,80%
		2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	14,96	14,13	Persen	94,45%	Rp. 5.805.800.000	Rp. 5.796.236.000	99,84%
		3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	115,77	114,33	Rp Juta /orang/ tahun	99%	Rp. 7.251.000.000	Rp. 7.245.679.000	99,93%
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS									
SK2	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1 Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	74	81	Persen	109,46%	Rp. 3.000.000.000	Rp. 2.970.600.000	99,67%
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH									

SK3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BPSDMI	73	43,35	Indeks	62,12%	Rp. 2.626.516.000	Rp. 2.616.008.905	99,60%
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	60	61,21	Persen	102%	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.499.757.485	99,98%
SK5	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	79,15	Nilai	107%	Rp. 2.467.978.000	Rp. 2.457.470.982	99,57%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	74	75	Nilai	101,35%	Rp. 3.043.347.000	Rp. 3.032.839.900	99,65%
		3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	77	69	Nilai	90%	Rp. 4.332.778.000	Rp. 4.322.271.000	99,76%
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92	93,75	Persen	102%	Rp. 1.881.518.000	Rp. 1.871.010.950	99,44%
		2	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3	2,85	Level	95%	Rp. 1.000.000.000	Rp. 962.241.000	97,02%

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat BPSDMI berusaha memaksimalkan pencapaian kinerja, baik terhadap *output*, maupun *outcome*. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan capaian efisiensi sumber daya pada Sekretariat BPSDMI, salah satunya karena adanya *refocusing/realokasi* anggaran/program/kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan nasional atau isu aktual terkini.

Pada awal tahun 2022, Sekretariat BPSDMI telah menetapkan Perjanjian Kinerja beserta anggaran yang menyertainya sebesar Rp. 63.246.443.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk dapat mewujudkan capaian target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDMI Tahun 2022.

Dengan adanya penambahan pagu dari hibah luar negeri dan pagu BLU serta penarikan blokir automatic adjustment maka pagu akhir dari Sekretariat BPSDMI berubah menjadi sebesar Rp 56.417.415.000,-. Dengan alokasi anggaran sebesar ini akan dapat mempengaruhi tingkat capaian target yang telah diperjanjikan. Realisasi anggaran yang dicapai oleh Sekretariat BPSDMI pada akhir tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 54.231.138.551,- atau 96,12% anggarannya, yang digunakan untuk mencapai target realisasi fisik sebesar 100% dalam usaha memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari data yang tersedia secara hitungan kasar dapat diperoleh kinerja efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2022 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kinerja} &= \frac{(\text{pagu awal}-\text{realisasi pagu akhir})}{\text{pagu awal}} \times 100 \% \\ \text{Efisiensi Anggaran} &= \frac{(63.246.443.000-54.231.138.551)}{63.246.443.000} \times 100 \% \\ &= 14,25\% \end{aligned}$$

Sebagaimana terlihat pada perhitungan di atas, nilai kinerja efisiensi anggaran Sekretariat BPSDMI Tahun 2022 adalah sebesar 14,25%, dimana persentase tersebut ini termasuk anggaran yang tidak terealisasi sebesar 3,82 % dari pagu akhir perubahan

yaitu Rp 56.417.415.000,-

3.4 Kendala dan Tindak Lanjut

3.4.1 Kendala

Kendala yang dihadapi Sekretariat BPSDMI Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan program dan tahun 2022 antara lain:

1. Terdapat keditaksesuaian target perjanjian kinerja BPSDMI dengan target yang telah disesuaikan dengan anggaran yang di dapatkan oleh BPSDMI (target volume output RKAKL);
2. Terdapat pengembalian bank garansi pada pengerjaan pematangan lahan proyek SBSN Pembangunan Gedung SMK-SMAK Bogor sehingga penyerapan anggaran belum maksimal;
3. Terdapat penarikan blokir *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan sehingga output yang dihasilkan belum maksimal;
4. Proses Pengadaan Belanja Barang dan Jasa harus dengan memperhitungkan Tingkat kandungan Dalam Negeri.

3.4.2 Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala pelaksanaan antara lain:

1. Mengantisipasi adanya *refocussing* anggaran;
2. Segera menindaklanjuti kendala yang terjadi dan menyiapkan berbagai antisipasi untuk mengatasinya;
3. Melakukan koordinasi dengan biro perencanaan terkait penyesuaian target;
4. Melakukan luncuran dan yang dikembalikan bank garansi ke tahun 2023;
5. Proses Pengadaan Belanja Barang dan jasa dengan memperhitungkan Tingkat kandungan Dalam Negeri menggunakan *e-procurement*;
6. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diantisipasi dan dilakukan perbaikan;

7. Melaksanakan koordinasi melalui *online* dan memaksimalkan media yang tersedia.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) 2020-2024. Pada tahun 2022 ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat BPSDMI merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat BPSDMI untuk tahun ketiga Renstra Sekretariat BPSDMI 2020-2024, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat BPSDMI di tahun sebelumnya. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat menjadi *feed back*, dan mendorong seluruh pegawai Sekretariat BPSDMI agar mengoptimalkan kinerja, sehingga dapat mewujudkan Sekretariat BPSDMI yang kompeten.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) selama tahun anggaran 2022, relatif cukup baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Capaian kinerja yang telah didapatkan ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat BPSDMI untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Sekretariat BPSDMI akan selalu berusaha memberikan pelayanan prima, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, karena masih banyak tantangan yang akan dihadapi, seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan baru khususnya di bidang pengembangan SDM Industri.